PERAN MASYARAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATI KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:

Nuzumul Laelli

1801046066

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN WALISONGO di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama

: Nuzumul Laelli : 1801046066

NIM Fak/Jur

: Dakwah dan Komunikasi/PMI

Judul Skripsi : Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan mohon agar segera diujikan. atas perhatiannya kami ucapkan terimaksih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang.15 September 2022

Pembimbing.

Abdul Ghoni, S. Ag. M. Ag NIP 19770709200501 1 003

i

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN MASYARAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATI KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA

Disusun Oleh:

Nuzumul Laelli

1801046066

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 21 September 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

nna

Dr. Agus Rivadi, S.Sos.I, M.S.I NR 198008162007101003

Ketua/Penguji I

Penguji III

<u>Dr. Nur Hamid, S.Pd., M.Sc.</u> NIP. 198910172019031010 Sekretaris/Penguji II

Abdul Ghoni, M.Ag. NIP. 197707092005011003

Penguji PV

Supribatiningsih, S.Ag., M.S.I MP. 197605102005012001

Mengetahui,

Pembimbin@

Abdul Ghoni, M.Ag. NIP. 197707092005011003

ERIAN A Disahkan oleh

ekan Fakulta Dakwah dan Komunikasi

September 2022

fol. Dr. H. Hyas Supena, M.Ag.

NP 197 04/02001121003

ii

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul "Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora" benar-benar hasil karya sendiri, bukan menjiplak dari orang lain sebagian maupun keseluruhan dari penulisan skripsi. Pendapat atau temuan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 September 2022

METERAL TEMPEL 129AJX972411484

> Nuzumul Laelli NINI: 1801046066

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan karena telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Masyarakat dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora". Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebuah perjalanan panjang telah mengantarkan penulis ke penghujung studi dan semua ini adalah proses yang tidak berdiri sendiri. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujus tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2. Prof. Dr. H Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- 3. Dr. Agus Riyadi, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang.
- 4. Bapak Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag selaku Wali Dosen dan Dosen Pembimbing yang selalu sabar membimbing, mengarahkan dan mendampingi dengan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
- Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu menghantarkan penulis menyelesaikan tugas akhir.
- 6. Para Dewan Penguji Sidang Munaqosah yang telah menguji dan membantu penulis menyempurnakan penelitian ini menjadi lebih baik.

- 7. Pihak instansi Pemerintah Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis selama penelitian.
- 8. Orang tua tercinta Bapak Suparmin dan Ibu Puji Ratmini yang senantiasa mendoakan, memberikan support serta dukungannya baik secara material maupun non material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada tahun ini.
- 9. Kakak tercinta Khoirul Munafirin, Miftakul Huda dan Usfah Pricilia Herbudi Anita yang selalu mendukung, mendoakan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga selalu bersemangat dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan pada tahun ini.
- 10. Nenek tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan wejangan-wejangan kepada penulis agar senantiasa melangkah di jalan yang benar.
- 11. Adek Sepupu Mega Triani dan Redita Sari yang selalu mendukung dan memberikan support kepada penulis.
- 12. Ibu Nyai Isnayati Kholis selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri mbah Rumi Ngaliyan Semarang yang telah memberikan ilmu serta nasehat-nasehat yang sangat luar biasa bermanfaat kepada penulis.
- 13. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 yang memberikan keseruan dan kebersamaan yang luar biasa selama ini.
- 14. Sahabat "Konco Plek" (KP) Zunaidah Al-Farisiyah Putri, Eka Yulia Ningsih, Ulfa Nasihatul Khoiriyah, Siti Khotijah, dan Nova Indriyanti yang selama ini telah menemani, memberikan warna dan berproses bersama sejak menjadi mahasiswa baru di UIN Walisongo Semarang.
- 15. Keluarga DS-5 Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Ngaliyan Semarang (Alif Ma'rifatus Sa'adah dan Afifatur Rohmah) yang keceriaanya dapat memberikan semangat penulis dalam menjalani hari.
- 16. Teman-Teman KKN MIT DR Ke-13 yang solidaritasnya membuat penulis merasakan berada di tengah-tengah keluarga.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berharap dan mendoakan semoga kebaikan semua pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi amal baik yang diterima

Allah SWT. Penulis menyadari walaupun segala kemampuan telah tercurahkan, namun

mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga ditemukan

berbagai kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu,

dengan hati yang tulus, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari pembaca

demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.akhir kata semoga skripsi ini dapat

bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 15 Septmber 2022

Nuzumul Laelli

NIM: 1801046066

vi

PERSEMBAHAN

Penyusunan skripsi ini, penulis mempersembahkannya untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Suparmin dan Ibu Puji Ratmini, kedua kakak penulis yaitu Mas Khoirul Munafirin dan Mas Miftakul Huda, serta nenek yaitu Simbah Lami. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, do'a, segala perjuangan serta kasih sayang yang telah diberikan, semoga menjadi pelajaran dan pemicu semangat bagi penulis untuk menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang. Bapak Ibu, Mas dan Mbah semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan atas segala pengorbanan yang telah engkau berikan selama ini.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِٱنْفُسِهِمُّ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri" (Al-Qur'an dan terjemahan, QS.Ar-Ra'd Ayat 11)

ABSTRAK

Nuzumul Laelli (1801046066), Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati kabupaten Blora.

Dalam pendayagunaan dana desa, masyarakat sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam setiap proses pelaksanaan program. Program-program pemberdayaan yang tidak tepat sasaran merupakan salah satu akibat dari kurangnya peran masyarakat dalam setiap proses pendayagunaan dana desa. Untuk itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pendayagunaan dana desa. Karena tanpa adanya peran serta masyarakat maka pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dengan maksimal, dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

Peran masyarakat merupakan proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora, (2) Bagaimana hasil Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora dan untuk mengetahui hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua hal sebagai berikut: pertama, bentuk peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora yaitu; (1) Memberikan usulan pada kegiatan perencanaan penganggaran dana desa, (2) Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, (3) Membangun kesadaran bersama akan pentingnya suatu program. Kedua, peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora menghasilkan beberapa hal yakni; (1) Terbukanya demokratisasi di tingkat desa, (2) Terungkapnya program-program pemberdayaan yang penting dan tidak pernah terfikirkan, (3) Masyarakat lebih aktif, (4) Terwujudnya sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Jati, (5) Menciptakan Kepercayaan Masyarakat.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Pendayagunaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN Error! Bookma	rk not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Teknik Pengumpulan Data	17
H. Uji Keabsahan Data	19
I. Teknik Analisis Data	20
BAB II	23
A. Peran Masyarakat	23
1. Pengertian Peran Masyarakat	23
2. Pengertian Pendayagunaan Dana Desa	25
B. Pemberdayaan Masyarakat	26

1.	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	26
2.	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	28
3.	Strategi Pemberdayaan Masyarakat	29
4.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa	30
5.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat	32
BAB II	П	37
A	Profil Desa Jati	37
1.	Sejarah Singkat Desa Jati	37
2.	Letak Geografis Desa Jati	38
3.	Jumlah Penduduk Desa Jati 2022	39
4.	Visi dan Misi Desa Jati	45
5.	Struktur Pemerintahan Desa Jati	46
В.	Besaran Dana Desa di Desa Jati	51
	Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan yarakat	
	Hasil Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk berdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora	67
вав г	V	77
	Analisis Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk berdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora	77
	Analisis Hasil Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk berdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora	
BAB V	7	86
Α.	Kesimpulan	86
B.	Saran	87
DAFT	AR PUSTAKA	88
LAMP	IRAN	92
DAET	AD DIWAYAT HIDLID	100

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Peta Desa Jati	39
GAMBAR 3.2	HEWAN TERNAK MASYARAKAT DESA JATI	42
GAMBAR 3.3	STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA JATI	47
GAMBAR 3.4	Musyawarah Dusun RW 02	60
GAMBAR 3.5	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Jati	63
GAMBAR 3.6	PEMBERIAN BANTUAN 1 EKOR KAMBING	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Presentase Penyerapan Dana Desa	. 5
TABEL 3.1	DATA BATAS WILAYAH DESA JATI	38
TABEL 3.2	DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN	39
TABEL 3.3	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN	40
TABEL 3.4	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR	43
TABEL 3.5	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA	44
TABEL 3.6	BESARAN ANGGARAN DD DAN PAD	.52
TABEL 3.7	SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PERAN MASYARAKAT DAL	AM
	PENDAYAGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MAS	YARAKAT
	DI DESA JATI	. 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada di desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(Moh. Solfiyanto, Ronny Malavia Mardani, 2017: 31)

Pembangunan Desa adalah bagian penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah pusat dan daerah, karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya menyentuh kepentingan masyarakat yang bertempat dinggal di desa secara langsung untuk menatasi kemiskinan masyarakat yang ada di desa. untuk mewujudkan pembangunan di desa, Pemerintah Desa adalah sistem penyelenggara Pemerintah Indonesia, oleh karena itu, desa mempunysi kewenangan, tugas serta kewajiban guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.(Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, 2018: 147)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas, wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah desa berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat.(Endah, 2020: 141)

Untuk menjalankan kewenangan di atas, Pemerintah Desa mempunyai sumber-sumber penerimaan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan atau program-program yang diselenggarakan. Salah satu hal yang penting adalah kepastian biaya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di Desa. Pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan bisa berasal dari berbagai sumber yaitu dari pemerintahan, swasta ataupun dari masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. di dalam PP tersebut berisi tentang sumber pembiayaan bagi desa untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan transfer dana bagi desa yang berbentuk hibah atau donasi.(Anwas, 2019: 49)

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Mendagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipasi Daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat desa adalah forum yang diselenggarakan untuk membahas rancangan pembangunan dan akan diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kecamatan. Hasil dari pelaksanaan musyarahan perencanaan

pembangunan desa tersebut berupa kesepakatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk pembangunan dalam jangka panjang maupun menengah.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan ditingkat daerah. Dengan cara tersebut pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam memberikan usulan dan mengambil keputusan, salah satunya yaitu melalui forum musrenbang.(Andrias, 2017:187)

Pemberdayaan masyarakat di desa mencakup pembangunan di segala bidang dalam kehidupan masyarakat. Program yang dijalankan pun harus menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat. Karena masyarakat adalah pelaku pemberdayaan juga maka mereka harus diikut sertakan dalam proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat desa. Yang mana pemerintah memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan fasilitis yang dibutuhkan. Sedangkan masyarakat desa ikut partisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pemberdayaan tidak akan berjalan dengan sehingga sulit untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan sasarannya. Partisipasi masyarakat desa dapat menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, karena pada

dasarnya masyarakat sendiri yang lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan desanya. Jadi dalam proses pemberdayaan, masyarakat bukan hanya sebagai obyek namun juga sebagai subyek.(M, 2018: 74)

Hal terpenting dalam pendayagunaan dana desa adalah peran serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program di desa. Masyarakat desa adalah bagian dari sasaran pembangunan nasional. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa yang dilakukan dengan pola swakelola yaitu kegiatannya dijalankan dengan cara mandiri oleh desa. Kegiatan yang dilaksanakan seperti menggunakan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di Desa Jati, sehingga uang yang digunakan dalam kegiatan hanya sedikit yang mengalir keluar, serta dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Desa Jati adalah salah satu desa di Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses penggunaan Dana Desa akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing desa tentu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, akan tetapi yang paling umum dalam pengelolaannya yaitu dengan menggunakan teknik *bottom-up* yang dalam hal in dilakukan melalui musyawarah dusun atau musyawarah desa. Proses *bottom-up* dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat RT ke RW yang kemudian ke dusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dusun selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (musrenbangdes).

Desa Jati telah melaksanakan perencanaan penganggaran dana desa melalui teknik *bottom-up* yang dimulai dari proses mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di desa dengan memaksimalkan aspirasi dari masyarakat desa. Penggunaan dana desa di Desa Jati dalam rangka untuk program

pemberdayaan masyarakat sejauh ini sudah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya. Masyarakat Desa Jati juga memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan dimana masyarakat Desa Jati aktif memberikan usulan dan pendapat, kemudian pada proses pengorganisasian masyarakat mudah untuk dikoordinir dan turut serta dalam setiap program.

Peranan masyarakat sangatlah penting karena dalalam proses perencanaan penganggaran dana desa, masyarakatlah yang lebih memahami permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, sehingga keterlibatan dan peran masyarakat dapat membantu kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana penganggaran dana desa. Kegiatan musrenbang biasanya dihadiri oleh perangkat Desa Jati seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, BPD, Kader PKK, Kepala Sekolah, dan Wakil, Partai Politik (PARPOL), dan masyarakat desa.

Keberhasilan dalam proses perencanaan penganggaran dana desa di Desa Jati dapat dilihat dengan terealisasinya program pemberdayaan di desa tersebut. Adapun presentase penyerapan dana desa yang telah terealisasi untuk program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Presentase Penyerapan Dana Desa

No	Tahun	Presentase Penyerapan DD	Capaian Output
1.	Tahun 2015	9%	100%
2.	Tahun 2016	9%	100%
3.	Tahun 2017	9%	100%
4.	Tahun 2018	9%	100%
5.	Tahun 2019	10%	100%
6.	Tahun 2020	15%	100%

(Sumber Data: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Jati)

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh informasi bahwa selama 6 Tahun berturut-turut program pemberdayaan di Desa Jati dapat direalisasikan oleh pemerintah desa. Realisasi program pemberdayaan di Desa Jati ini berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Artinya di dalam realisasi tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di Desa Jati dalam proses keikutsertaan-nya untuk merencanakan pembangunan. Sehingga dengan adanya peran masyarakat dalam proses perencanaan program membuat jumlah anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat menjadi meningkat. Yang mana sebelum adanya peran masyarakat presentase penyerapan dana desa hanya sebesar 9% namun setelah adanya peran masyarakat jumlah presentase penyerapan dana desa menjadi 15% dari jumlah anggaran.(Iswanto, n.d., p. pada tanggal 20 Mei 2022)

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilaksanakan di Desa Jati diperoleh fakta yang mana perencanaan penganggaran dana desa dengan menggunakan teknik bottom-up berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Jati. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jati dinilai aktif dalam memberikan usulan. Walaupun Desa Jati berada jauh dari pusat kabupaten namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk membangun di daerahnya. Hal itu dinilai dengan adanya program pemberdayaan yang merupakan hasil usulan masyarakat melalui musrenbang. Sehingga program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Dengan adanya dana desa, pemberdayaan masyarakat di Desa Jati sangat berkembang dalam segi pemberdayaan di bidang pertanian yaitu pembuatan sumur gali di area persawahan yang notabene-nya sulit untuk mendapatkan air sekarang dapat teratasi, sehingga hasil pertanian-nya pun lebih menjanjikan.

Selain itu, pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak Suparmin salah satu perangkat Desa Jati.(Suparmin, n.d., p. pada tanggal 20 Mei 2022)

Menurut Ibu Lismiyati sebelum adanya dana desa sektor perekonomian masyarakat pun kurang stabil. Setelah adanya program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan dari dana desa masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam mendayagunakan dana desa.(Lismiyati, n.d., p. pada tanggal 26 Mei 2022)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah peneliti ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran masyarakat dalam pendayagunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora?
- 2. Bagaimana hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian Peran Masyarakat dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora memiliki beberapa tujuan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
- Untuk mengetahui hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, dapat dijadikan sebagai masukan, pegangan, pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan pemerintah dari pihak-pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan masyarakat terutama dalam peran masyarakat, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta digunakan untuk mengetahui peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini bisa membantu menambah wawasan maupun referensi keilmuan mengenai peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sekaligus evaluasi terhadap

peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui penelitian ini asli dilakukan oleh peneliti, maka harus dipaparkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Penelitian dengan topik yang hampir sama dengan penelitian ini tentunya sudah banyak di teliti oleh peneliti-peneliti yang terdahulu. Oleh katena itu, untuk menghindari plagiarism penulis mencantumkan beberapa penelitian yang serupa. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh A. M. Dirga Firgiawan (2018) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui wujud partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng, 2). Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terwujudnya komunikasi partisipatif masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah; 1). Partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih 2). Faktor Pendukung dalam Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Adapun faktor penghambatnya adalah berkurangnya kesadaran mereka karena kesibukan pribadi yang tidak ingin ditinggalkan dan anggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah serta ketidak puasan masyarakat dalam realisasi program. Yang membedakan penelitian A.M. Dirga Firgiawan dengan penelitian ini yaitu terletak pada isi, penelitian ini mengacu pada partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan faktor pendukung dan penghambat dari partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih meneliti peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat bukan hanya berperan dalam kegiatan musrenbang. Persamaan dengan penulis yaitu masyarakat sama-sama memberikan usulan dalam proses perencanaan pembangunan dan ikut berkontribusi dalam kegiatan musrenbang.

Kedua, penelitian oleh Wulan Budiningsih (2019) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasil. Hasil dari penelitian ini adalah; 1). Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat. 2). Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan riset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga setempat. 3). Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar. 4). Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan

pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Yang membedakan penelitian Wulan Budiningsih dengan penelitian ini adalah penelitian Wulan Budiningsih memfokuskan pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peran masyarakat dan hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Persamaan penelitian Wulan Budiningsih dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pengelolaan dana desa untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah masing-masing.

Ketiga, penelitian oleh Faizatul Karimah (2014) mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat". Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil-hasil pemberdayaan masyarakat yang didanai alokasi dana desa di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah; 1). Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh ADD meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. 2). Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD. Yang membedakan penelitian Faizatul Karimah dengan penelitian ini adalah penelitian Faizatul Karimah memfokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peran dan hasil dari peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada peran masyarakat dalam melakukan penganggaran dana desa bukan melalui alokasi dana desa. Persamaan penelitian Faizatul Karimah dengan penelitian ini adalah sama-sama memanfaatkan atau menggunakan anggaran untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat.

Keempat, penelitian oleh Muhammad Yunus (2014) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar vang berjudul "Pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa". Penelitian ini bertujuan untuk; 1). Untuk mengetahui Pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 2). Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah; 1). Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan cara menciptakan mekanisme dari dalam untuk meluruskan keputusan-keputusan Alokasi Dana Desa yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat memiliki pengaruh. 2).

Pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa pada dasarnya sudah terlaksana akan tetapi masih ada Sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi di dalam Pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui proses pelaksana Pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut disebabkan karena kesibukan masing-masing masyarakat di Desa mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Perbedaan dengan penulis yaitu pada objek kajian penelitian ini membahas tentang pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Sedangkan objek kajian penelitian ini yaitu mengenai peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Perbedaan penelitian Muhammad Yunus dengan penelitian ini adalah penelitian Muhammad Yunus memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran dan hasil dari peran masyarakat melalui pendayagunaan dana desa. Persamaan penelitian Muhammad Yunus dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan sumber penerimaan atau anggaran dari pemerintah.

Kelima, penelitian oleh Bambang Hermanto (2018) mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi yang berjudul "Pengaruh Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun". Penelitian ini bertujuan untuk; 1). Untuk mengetahui pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

2). Untuk mengetahui upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai

Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah; 1). Terdapat enam pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, diantaranya; a. pembangunan talud dan jalan setapak, di mana memudahkan masyarakat Desa Raden Anom dalam memenuhi kebutuhannya dan juga memudahkan dalam akses perjalanan. b. Rehabilitasi PAUD, di mana anak-anak dan pengajar lebih maksimal dalam proses belajar mengajar demi terwujudnya peningkatan pendidikan yang ada di Desa Raden Anom. 2). Terdapat beberapa upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom diantaranya; a. Mengikuti pelatihan, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Raden Anom kepada seluruh perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi banding ke pulau jawa dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Raden Anom. b. Melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya. Perbedaan penelitian Bambang Hermanto dengan penelitian ini adalah penelitian Bambang Hermanto lebih memfokuskan pada pengaruh dan upaya dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai peran dan hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa. Sehingga objek kajian penelitian dari keduanya memiliki perbedaan dan sumber anggaran dari kedua penelitian tersebut juga berbeda. Persamaan penelitian Bambang Hermanto dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati kecamatan Jati Kabupaten Blora. Selain itu penelitian kualitatif deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

2. Definisi Konseptual

Peran Masyarakat menurut Larry W. Carter adalah "proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab".

Sedangkan Arimbi HP mengartikan peran serta masyarakat sebagai partisipasi masyarakat sebagai bentuk kekuatan dan kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai kekuatan untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pejabat negara. Menempatkan masyarakat setara dengan penguasa dengan menjalankan prinsip kemitraan,

sehingga suara masyarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.(Rahayu, 2003)

Menurut KBBI, "pendayagunaan" memilliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan tepat dan baik. Istilah pendayagunaan hampir sama dengan kata pemanfaatan yang berarti proses, cara, atau pemanfaatan. Ini berarti pemanfaatan mengandung makna sebagai proses untuk menggunakan sesuatu hal.(Aziz, 2020: 23)

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari dana perimbangan pusat dan daerah.(Bawono, 2019)

Menurut Gunawan Sumadiningrat pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.(Sumadiningrat, 1999: 66)

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Jati ini dikarenakan dalam proses pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati menurut peneliti terdapat beberapa hal yang menarik dalam penyelenggaraan program khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sejauh mana peran masyarakat dalam melakukan pendayagunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat dan bukan dalam bentuk angka.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada objek yang diteliti. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman. Dalam penelitian, peneliti memperoleh data primer secara langsung dari beberapa informan yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Jati. Yang mana informan tersebut terdiri dari 5 Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun Desa Jati, serta 6 masyarakat Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang bukan sumber utama, yang bersifat data tambahan. Sumber data tambahan ini biasanya berasal dari dokumen tertulis melalui dari karya ilmiah populer dan semua buku atau catatan tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik atau metode menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda tetapi hanya dapat melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (test), serta dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan salah satu maupun gabungan melihat masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora melalui berbagai kondisi dan situasi nyata yang terjadi dalam tata cara penyusunan perencanaan partisipatif.

b) Wawancara.

Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan yang diteliti. Melalui wawancara peneliti berusaha mengumpulkan gejala yang sedang diteliti melalui kegiatan tanya jawab.(Singarimbun & Effendi, 1985:145)

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang berkaitaan dengan peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Informan yang diwawancarai adalah kepala desa, sekertaris desa, kepala dusun, dan masyarakat yang terlibat dalam pendayagunaan dana desa.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mencari data atau informasi dari buku- buku, catatan- catatan, surat kabar, transkip, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman konsep teori yang berkaitan dengan profil badan atau lembaga yang bersangkutan.(Imam, 2013: 143) Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian terdiri atas foto-foto yang diabadikan pada saat melakukan penelitian dan penggunaan sumber lain berupa referensi dan data yang relevan dalam kegiatan musrenbang.

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan klarifikasi data melalui penggunaan saluran pengambilan data yang berbeda sampai data yang diambil jenuh, sehingga dapat mengambil sintesa data yang abash dan valid. Sahide mengeksplorasi prinsip triangulasi yang disebut *multiple triangulation* antara lain empat hal tersebut adalah triangulasi sumber, triangulasi penelitian, triangulasi metode dan triangulasi teori.

Jadi, untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik validitas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud valid adalah menunjukkan ketepatan antara data yang terjadi dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang valid peneliti menggunakan cara triangulasi sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang

telah didapatkan. Hal ini dicapai dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi di lapangan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda seperti pagi, sore dan malam.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.

Proses analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan merupakan proses yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga disebut sebagai interaktif. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tentang peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan di Desa Jati dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan dan sifatnya bukan angka. Data

dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa data yang ada peneliti menggunakan teori dari Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang tepat dan dapat menentukan fokus juga pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan beberapa pemerintah desa dan masyarakat desa Juntuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa.

2. Reduksi data

Proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung ke dalam catatan penelitian. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

(Data display) suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan dan tindakan yang diusulkan. Penyajian data yang diperoleh di lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.(Sugiono, 2006:54) Dalam penyajian data ini peneliti menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian degan pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

4. Penarikan kesimpulan

Adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya. Hasil dari data tersebut maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan memverifikasi data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah dengan jelas mengenai Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana DEsa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran Masyarakat

1. Pengertian Peran Masyarakat

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.(Kebudayaan, 1983: 583) Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.(Ahmadi, 1982: 50) Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.(Soerjono Soekanto, 2002: 243)

Dikaitkan dengan masyarakat, maka peran masyarakat memiliki artian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencerminkan kesamaan perilaku sebagai sebuah entitas komunal yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu. Dari pemahaman tersebut di atas, maka peran masyarakat memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Perilaku sekelompok orang, dimana tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh individu-individu yang ada dalam suatu kelompok.
- b) Adanya pembagian peran masing-masing anggota kelompok.
- c) Adanya kesamaan perilaku dari kelompok tersebut yang meliputi pola pikir dan pola tindak.

- d) Perilaku tersebut merupakan perwujudan dari ciri atau kehendak kelompok.
- e) Dilakukan dalam suatu struktur sosial tertentu.(HP, 1994: 79)

Peran masyarakat bukan hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Peran masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Peran masyarakat merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Peran masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kea rah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.(Anwas, 2019: 93) Peran masyarakat dalam proses pendayagunaan dana desa salah satunya ditunjukkan oleh adanya masyarakat yang berperan aktif sebagai penggerak.(Nur Hamid, Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi, 2021)

Tujuan peran masyarakat dalam pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- b) Meningkatkan peran, kemandirian dan kerjasama dengan lembagalembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai
- c) Meningkatkan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat
- d) Memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.(M, 2018: 77)

2. Pengertian Pendayagunaan Dana Desa

Pendayagunaan berasal dari kata "daya" yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, dan kata "Guna" yang artinya manfaat. Pendayagunaan merupakan suatu cara atau usaha untuk memperoleh sebuah manfaat yang lebih baik.(Qodariah Barkah, Peni Cahaya Azwari, 2020: 170) Menurut KBBI, "pendayagunaan" memilliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan tepat dan baik. Istilah pendayagunaan hampir sama dengan kata pemanfaatan yang berarti proses, cara, atau pemanfaatan. Ini berarti pemanfaatan mengandung makna sebagai proses untuk menggunakan sesuatu hal.(Aziz, 2020: 23)

Hal yang penting yang bisa diterapkan dalam pendayagunaan dana desa adalah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi 4 asas yaitu transparan, akuntabel, Partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu Pemerintah Desa juga harus mengikutsertakan masyaraka dengan melakukan kegiatan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa. Sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut hanya sedikit yang akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.(Mulyani, n.d.: iv)

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sering diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, dengan dilakukan perencanaan ke arah yang lebih baik.(Usman, 2015: 44) Menurut Gunawan Sumadiningrat pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.(Sumadiningrat, 1999: 66) Sedangkan menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a) *Enabling*, adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang. Setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu dengan cara memberikan dorongan (*encourage*), memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*).
- b) *Empowering*, adalah meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
- c) Protecting, adalah melindungi kepentingan dengan mengembangkan system perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.(Hanafi, 2018:
 2)

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini

berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam beberapa aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan.(Anwas, 2019: 49)

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi, pertama, mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya, dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang. Kedua, memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya. Ketiga, penyediaan berbagai masukan, dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya pokok yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dengan fasilitas-fasilitasnya.(M, 2018: 164)

Pemberdayaan bukan hanya sebagai penguatan individu atau perseorangan, tetapi juga pranata-pranata (system dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat di dalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula advokasi/pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tidak sehat. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap apa yang diberikan. Namun, apa yang dinikmati

harus dihasilkan dari usaha mereka sendiri. Dengan demikian masyarakat menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam harga diri.(Haryu, 2017: 10) Pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan bahwa suatu upaya pengambilan kebijakan dalam menggapai tujuan pembangunan nasional dengan mengelola potensi-potensi sumber energi baik sumber yang berasal dari energi manusia maupun yang dari alam sehingga tercipta masyarakat yang mandiri.(Yulian, 2021: 10)

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).(Soerjono Soekanto, 1987: 75) Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.(Syarfi'i, 2007: 70)

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut:

a) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan. b) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.(Nyoman Sumaryadi, 2005: 114)

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan harus menanamkan di dalam diri masyarakat yang diberdayakan dengan sebuah kemandirian. Hal tersebut untuk menghindari rasa ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah atau organisasi yang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka dapat mengelola program pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Langkah tersebut ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an

Artinya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum maka niscaya tidak ada yang mampu menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra'd [13]:11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat seseorang ataupun masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat.(Ulfi Putra Sany, 2019: 36)

Menurut Mardikanto & Soebianto strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu mikro, mezzo, dan makro.

a) Mikro

Pemberdayaan yang dilaksanakan dan ditujukan kepada masyarakat secara perorangan (individu). Bertujuan dalam melatih masyarakat untuk menyelesaikan dan mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan kehidupan.

b) Mezzo

Pemberdayaan dilaksanakan dan ditujukan untuk sekelompok masyarakat. Pemberdayaan menggunakan kelompok sebagai media pembelajaran dan intervensi melatih dalam hal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, perilaku sosial, dan penyelesaian masalah dalam lingkungan yang lebih besar.

c) Makro

Pemberdayaan ini mencakup lingkungan yang lebih besar karena target yang diinginkan melakukan perubahannya lebih luas. Strategi pelatihan yang dilakukan mencakup dalam perumusan kebijakan, perencanaan sosial, organisasi masyarakat, manajemen konflik. Strategi ini bertujuan untuk melatih masyarakat dalam menentukan strategi yang tepat dalam bertindak untuk penyelesian masalah. (Miswar Tumpu, Mansyur, n.d.: 18)

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat atau kelompok yang meliputi penguatan-penguatan modal sosial, patuh akan aturan, dan jaringan, modal sosial yang kuat maka kita akan lebih mudah mengarahkan masyarakat, menguatkan knowledge, money dan people. Dengan begitu, konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk mencapai kesejahteraan sosial.(D, 2019: 1)

Secara konseptual, ada 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam dalam setiap kegiatan yang dikelola. Namun, berbeda dari organisasi bisnis, kendati pemungutan *fee* telah menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi keuntungan yang diperoleh dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.

Kedua, konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan (empowerment encourages community members to share in the self- esteem that occurs as a neighbourhood that other have abondened takes on a new life.

Ketiga, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya pembangunan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. "*Doing empowerment activities involves linking together service and training programs with physical construction projects*".

Keempat, dalam menerapkan konsep pemberdayaan harus bisa memaksimalkan sumber daya (*resources*), khususnya dalam hal dana,

baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan sosial (to accomplish their agenda of economic empowerment for those in need, the empowerment must bring together resources from government, charities, and private investor).

Kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai "katalis" yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro (people empowerment boards bridge the gap between city wide development goals and those within neighbourhoods).(Miswar Tumpu, Mansyur, n.d.: 96)

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak akan terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a) Motivasi

Menurut Hamzah B. Uno (2007), motivasi bisa diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu yang membuat seseorang bertindak.

b) Kebijaksanaan Pemerintah

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan

pemerintah, surat-surat keputusan Menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

2. Faktor Penghambat

a) Anggaran

Menurut Munandar (2011) adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

b) Sarana dan Prasarana Menurut Soepartono (2006) yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.(M, 2018: 78)

6. Korelasi antara Pemberdayaan Masyarakat dengan Dakwah

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata "power" yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan yakni yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, *and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat adalah segala usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar bisa mencapai kehidupan yang sejahtera. Keberdayaan masyarakat terlihat ketika masyarakat berani membuat keputusan untuk

memperbaiki hidupnya kearah yang lebih baik. Dalam artian tidak tergantung lagi dengan kebijakan dan kendali orang lain.

Pemberdayaan dalam perspektif islam seperti pendapat M. Quraish Shihab tentang konsep pembangunan yang harus bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam kedalam jati diri manusia. Ajaran ini bertujuan agar dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi meteril maupun spiritual secara bersamaan. Islam merangkum materil dan spiritual dalam satu wadah yang sama agar keduanya saling menguatkan. Manusia akan menjadi pribadi yang unggul ketika kedua aspek tersebut terpenuhi. Pribadi yang unggul akan menjadi figur yang bisa menjadikan dirinya sebagai tumpuan juga bagi orang-orang di sekitarnya.

Pemberdayan masyarakat sebagai sebuah upaya yang dilakukan dalam berbagi kegiatan di tengah masyarakat. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pemberdayaan juga diartikan sebagai perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Istilah pemberdayaan juga dapat dihubungkan dengan dakwah sebab tujuannya adalah sama-sama mengajak manusia supaya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat juga berarti sebagai perubahan masyarakat kearah yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. namun pemberdayaan juga mengandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, dan mampu hidup mandiri. Melalui

kegiatan pemberdayaan, maka individu dan masyarakat menjadi sadar akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri maupun lingkungannya.(Anwas, 2019: 49)

Nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam Surah An-Nahl Ayat 125 juga bisa diterapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat:

Artinya:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk". (QS. An-Nahl:125)(RI, 2005: 281)

Tiga intisari dari ayat tersebut dapat digunakan juga dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pertama yaitu *al-Hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, aplikasinya dimulai dari proses penyadaran. Penyadaran terhadap kondisi yang terjadi, kondisi yang bisa dirubah, kondisi yang dipertahankan, dan beragam kondisi lainnya. Bijak sebagai pembuat kebijakan, bijak sebagai pelaksana dan beragam kondisi yang lainnya. Kedua, *al-Mauidzatil al-Hasanah* yaitu pengajaran yang baik. Sebagai pelaksana pemberdayaan harus mampu menjadi fasilitator, pendamping masyarakat, motivator, pemimpin, dan peran yang lainnya. Dimulai dari proses penentuan kebijakan, pendampingan di lapangan maka seorang *agent of change* harus mampu mengajarkan, dan mendampingi masyarakat. Ketiga, *al-*

Mujadalah yaitu diskusi atau musyawarah. Salah satu prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya masyarakat yang paling paham apa yang mereka butuhkan. Masyarakat bukan hanya sebagai objek objek pemberdayaan, tetapi juga sebagai penentu kebutuhan mereka. Posisi seorang pemberdaya berfungsi sebagai fasilitator, motivator, pendamping masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakatlah yang harus merumuskan apa yang paling mereka butuhkan. Ketika masyarakat mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya maka akan dimusyawarah kembali secara seksama antar semuaa unsur yang terlibat untuk mengetahui kebutuhan apa yang paling mendesak, kemudian dicarikaan solusi yang paling tepat untuk menanganinya pemmberdayaan sesuai dengan program masyarakat.(Alhidayatillah, 2017)

BAB III

PERAN MASYARAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATI KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA

A. Profil Desa Jati

1. Sejarah Singkat Desa Jati

Terdengar cerita daerah pedesaan di tepi hutan, yang memiliki tumbuhan hijau di atas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun penduduk tersebut masih tergolong primitive, orang menyebutnya sebagai "Desa Jati". Lokasinya berada 3 km ke arah selatan dari kota kecamatan. Sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Desa Jati merupakan pusat pemerintahan setingkat kecamatan, hal ini terbukti karena banyaknya peninggalan yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah akses jalan, fasilitas pemerintahan termasuk tata ruangnya.

Pada masa sebelum kemerdekaan, pusat pemerintahan desa se-Kecamatan Jati berada di Desa Jati. Nama Desa Jati diambil dari komoditas andalan wilayah pada waktu itu yaitu kayu jati, hingga sekarang ini kayu jati masih menjadi andalan komoditas hutan di Desa Jati. Beberapa dari masyarakat Desa Jati pun memiliki usaha mebel seperti meja, kursi, almari yang terbuat dari bahan kayu jati asli. Bahkan kayu jati dijadikan sebagai ikon perbatasan antara Desa Jati dan Desa Doplang.

Pada tahun 1916 mulai ada pemerintahan di bawah pimpinan lurah/kades di bawah naungan kerajaan Surakarta. Karena pada tahun 1916 itu dimulai pemilihan Kepala Desa di bawah kendali pemerintahan Belanda.

Kepala Desa yang terpilih pertama kali yaitu Somo Wijoyo. Dari cerita singkat di atas dapat disimpulkan bahwa cikal bakal Kecamatan Jati berada di Desa Jati. Secara umum Kecamatan Jati terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah pertanian dan hutan. Di sebelah selatan Kecamatan Jati berbatasan dengan Kabupaten Ngawi sedangkan di sebelah barat Kecamatan Jati berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

2. Letak Geografis Desa Jati

Desa Jati adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Desa Jati ini berada di wilayah Blora bagian selatan. Jarak dari ibukota Kabupaten Blora ke Desa Jati adalah 50 km. Dari segi aksesibilitas, Desa Jati ini mudah dijangkau dari banyak sekali daerah disekitarnya. Wilayah Desa Jati berbatasan langsung dengan sejumlah desa yang ada di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. Secara geografis, Desa Jati ini memiliki luas wilayah 1.634.702 m². Kondisi topografi tergolong dataran rendah, dengan ketinggian 77 meter di bawah permukaan laut, dengan curah hujan 2000/3000 mm, dan suhu antara 27-30 derajat celsius. Desa Jati terletak diantara beberapa desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Batas Wilayah Desa Jati

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Doplang	Jati
Sebelah Selatan	Desa Jegong	Jati
Sebelah Barat	Desa Singget	Jati
Sebelah Timur	Desa Jegong	Jati

(Sumber Data: Dokumen Profil Desa Jati Tahun 2022)

Dari segi administratif dan kewilayahan, Desa Jati terdiri dari 8 dusun yaitu Dusun Bantengan, Dusun Bebegan, Dusun Dusun Klanding, Dusun Karang, Dusun Karang Rejo, Dusun Kayen, Dusun Jati, dan Dusun Banyu Urip.

Karangrejo

Kalang

Belavurip

Belavurip

Ds Jegong

Ds Jegong

Ds Jegong

Light Jegon

Light Je

Gambar 3.1 Peta Desa Jati

Sumber Gambar: Peta wilayah Desa Jati 2022

3. Jumlah Penduduk Desa Jati 2022

Kecamatan Jati terdapat 12 desa yang salah satunya yaitu Desa Jati. Desa Jati memiliki 8 RW dan 42 RT. Menurut data yang diterima dari laporan Desa Jati yang sesuai dengan jumlah kependudukan pada buan Juli 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Desa Jati Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
5.180	2.587	2.593

(Sumber Data: Dokumen Profil Desa Jati Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Jati sebanyak 5.180 jiwa yang terdiri dari 2.587 lakilaki dan 2.593 perempuan. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk perempuan tersebut melebihi jumlah penduduk lakilaki yang ada di Desa Jati. Dalam penelitian peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jai kabupaten Blora, peneliti mengambil sampel pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Bebegan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, BPD, ketua RT 01/RW 02, Ketua RT 02/RW 02, RT 03/RW 03, dan RT 04/RW 04.

b. Jumlah Penduduk Desa Jati Berdasarkan Mata Pencaharian

Secara umum kondisi perekonomian Desa Jati ditopang oleh beberapa mata pencaharian dan teridentifikasi dalam beberapa bidang. Berikut beberapa data yang diperoleh peneliti dalam observasi tentang jenis mata pencaharian yang ditinjau dari jumlah penduduk diantaranya adalah:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.042
2.	Ibu Rumah Tangga	559
3.	Pensiunan	13
4.	PNS/TNI/POLRI	67
5.	Guru	27
6.	Dosen	1

9.	Dokter	1
10.	Bidan	2
11.	Perawat	5
12.	Perangkat Desa	16
13.	Karyawan Swasta	141
14.	Karyawan BUMN	1
15.	Wiraswasta	309
16.	Pedagang	16
17.	Petani	2.442
18.	Buruh Tani	12
19.	Sopir	5
20.	Lainnya	521
	Jumlah Total	5.180

(Sumber Data: Dokumen Profil Desa Jati Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Jati sebagian besar sebagai petani yang berjumlah 2.442 orang. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Jati bermata pencaharian sebagai petani. Aktivitas masyarakat petani Desa Jati sehari-harinya bekerja dengan menggarap sawah mereka mulai dari pagi hingga waktu dzuhur, kemudian kembali lagi ke sawah sekitar pukul 14.00 sampai dengan sore hari pukul 16.00. Terkadang bagi mereka yang kembali ke sawah sore hari sekitar pukul 16.00 mereka akan pulang larut dan hampir tiba waktunya sholat maghrib. Dalam 3 bulan sekali petani panen hasil dari sawah yang digarapnya. Penghasilan mereka setiap panennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada dua kekuatan ekonomi masyarakat yang telah tumbuh dan menjadi andalan masyarakat setempat yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Sektor perekonomian di Desa Jati ini antara lain adanya sektor pertanian meliputi padi, jagung, kedelai, dan kacang hijau. Selain unit usaha pertanian ada juga unit usaha peternakan, yang meliputi sapi, kambing, dan ayam. Unit usaha peternakan ini ada karena potensi yang ada di desa Jati sejak dulu masyarakatnya memiliki peternakan sapi, kambing, dan ayam. Hal demikian sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan dari observasi, berikut hasil wawancara dengan Bapak Lukito selaku masyarakat Desa Jati:

"Sejak zaman dulu masyarakat di Desa Jati banyak yang bekerja sehari-hari dengan menggarap sawah, adapun masyarakat yang memiliki ternak, yaitu ternak sapi, kambing, dan ayam mbak. Tak sedikit dari mereka yang menggembala kambing dan sapi di sore hari. Namun untuk sekarang ini masyarakat sudah jarang sekali menggembala kambing dan sapi mbak, karena mereka sudah mulai beralih dengan pemberian rumput gajahan bahkan adapula yang melakukan fermentasi makanan untuk hewan ternak mereka, dengan begitu suatu pekerjaan menjadi lebih mudah." (Lukito, n.d. pada tanggal 12 Juli 2022)



Gambar 3.2 Hewan Ternak Masyarakat Desa Jati

Sumber Gambar: Dokumentasi oleh peneliti, 2022

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menjadi penentu kemajuan di suatu desa. Berikut beberapa data yang didapatkan peneliti dalam observasi mengenai pendidikan akhir yang ditinjau dari jumlah penduduk diantaranya:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.082
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	324
3.	Tamat SD/Sederajat	713
4.	SLTP/Sederajat	560
5.	SLTA/Sederajat	2.259
6.	Diploma II	13
7.	Diploma III	43
8.	Strata I	184
9.	Strata II	2
	Jumlah Total	5.180

(Sumber Data: Dokumen Profil Desa Jati Tahun 2022)

Dari tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan akhir masyarakat di Desa Jati sebagian besar tamat SLTA yang totalnya 2.259 orang, yang menempati urutan kedua yaitu tidak/belum sekolah yang berjumlah 1.082 orang, dan yang ketiga yaitu tamat SD yang berjumlah 713 orang. Masyarakat Desa Jati dapat dikatakan sebagai masyarakat yang melek akan pendidikan. Dari tahun ke tahun terlihat

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk generasi penerus bangsa. Masyarakat membekali anaknya dengan pendidikan sekurang-kurangnya hingga tamat SLTA.

Pendidikan merupakan suatu hal yang lumrah, yang selalu berhubungan erat dengan bidang apapun, termasuk dalam hal ini kesadaran terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan. Kesadaran masyarakat merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan program pemberdayaan. Artinya tanpa adanya kesadaran masyarakat terkait dengan program pemberdayaan maka tentu perubahan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.(Hamid, 2013)

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Jati memiliki beberapa keberagaman keyakinan yang dianut masyarakatnya. Keberagaman ini tidak menimbulkan perpecahan atau konflik, namun sebaliknya masyarakat tetap guyub rukun. Masyarakat juga mengikuti kegiatan rutin seperti pengajian Al-Barzanji, tahlilan, dan khataman. Berikut adalah beberapa data yang diperoleh peneliti dalam observasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Jati, diantaranya:

Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Islam	5.177
2.	Kristen	2
3. Katholik		1
	Jumlah Total	5.180

(Sumber Data: Dokumen Profil Desa Jati Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 6 di atas, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Jati yang beragama Islam yaitu sebanyak 5.177 orang, sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 2 orang, dan yang memeluk agama Katholik sebanyak 1 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penduduk Desa Jati ini hampir keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Namun, masyarakat Desa Jati menghargai sebuah perbedaan yang ada diantara mereka. Masyarakat Desa Jati saling toleran dan dapat hidup berdampingan satu sama lain. Oleh sebab itu, suasana keagamaan masyarakat Desa Jati ini sangat rukun, tenang, dan damai.

4. Visi dan Misi Desa Jati

Setiap desa pasti memiliki suatu gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Begitupun Desa Jati, memiliki sebuah cita-cita untuk membawa perubahan kea rah yang lebih baik. Dalam mewujudkan cita-cita desa, maka Desa Jati memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Desa

Untuk memberikan arah dan cita-cita kedepan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan visi yang jelas sebagai berikut:

"Terwujudnya Desa yang Maju, berdikari dan bermanfaat"

Rumusan visi di atas adalah sebuah ungkapan dari suatu niat guna memperbaiki penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jati sehingga dalam masa pemerintahan ini dapat memberikan dampak positif yaitu perubahan yang lebih baik, dapat meningkatkan kemajuan desa serta dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dan rasa saling memiliki antara masyarakat satu dengan yang lain mengenai

penyelenggaraan pemerintahan dan proses pelaksanaan pembangunan di Desa Jati.

b. Misi Desa

Untuk menentukan tujuan dasar dan menciptakan pemerintahan desa yang baik maka diperlukan misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan Pemerintah Desa yang sejuk, transparan dan bersih sehingga terbentuk masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
- 2) Mendorong program-program pemberdayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- 4) Memperkuat pembangunan di segala bidang, baik infrastruktur maupun yang lainnya
- 5) Memperkuat kelembagaan desa
- 6) Mewujudkan tatanan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan YME, untuk menjalankan agama yang dianutnya
- 7) Mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam memberikan masukan-masukan yang bertujuan untuk kemajuan pembangunan

5. Struktur Pemerintahan Desa Jati

a. Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Jati, Kecamatan Jati,
 Kabupaten Blora

Pemerintahan Desa merupakan substansi dari sistem penyelenggaraan pemerintah, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Tujuan dari adanya pemerintahan desa adalah mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan Desa di naungi oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi kesejahteraan,

Kasi Pelayanan, dan Kpela Dusun. Berikut adalah struktur Pemerintahan Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA JATI

KEPALA DESA
Supardi

SEKRETARIS
Suwigayo

SUMIRANIAN
Heri Iswanto

KASI
PELAYANAN
Heri Iswanto

KAJI
KASI
PELAYANAN
Sigit Marwanto
Puji Hartanto

KADUS
KADUS
KARANG
REUANGAN
Pajari

KADUS
KADUS
KARANG
KARANG
RAPIN
BUGI Hartanto

KADUS
KARANG
KARANG
RAPIN
BUGI Hartanto
Suparmin
Sumarno

KADUS
KARANG
KADUS
KARANG
KAPUN
SUPARINI
Sumarno
Suparmin
Sumarno
Suparmin
Sumarno

KEDI
Supadi
Damin
Jayo
Desy Ayu R

Gambar 3.3 Struktur Pemerintahan Desa Jati

Sumber Gambar: Dokumen SOTK Desa Jati Tahun 2022

Berdasarkan pada gambar di atas, diketahui bahwa yang mengurusi secara langsung bidang anggaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan.

b. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Jati

Berikut dipaparkan tugas dan fungsi Pemerintah Desa yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa:

1) Kepala Desa

a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala pemerintah Desa, yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1. Tata praja pemerintahan
 - 2. Penetapan peraturan di Desa
 - 3. Pembinaan masalah pertanahan
 - 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat
 - 6. Administrasi kependudukan
 - 7. Penataan dan pengelolaan wilayah
 - 2. Melaksanakan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 - 1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan
 - 2. Pembangunan bidang pendidikan, dan
 - 3. Kesehatan
 - 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2. Partisipasi masyarakat
 - 3. Sosial budaya masyarakat
 - 4. Keagamaan dan ketenagakerjaan
 - 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi dan politik
 - 2. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan keluarga

- 3. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna
- 5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- 6. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan(Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

a. Sekretaris Desa

- Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat desa
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- 3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti:
 - 1. Tata naskah
 - 2. Administrasi surat menyurat
 - 3. Arsip, dan
 - 4. Ekspedisi
 - b) Melaksanakan urusan umum, seperti:
 - 1. Penataan administrasi Perangkat Desa
 - 2. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor
 - 3. Penyiapan rapat
 - 4. Pengadministrasian asset dan inventarisasi
 - 5. Pengadministrasian perjalanan dinas

- 6. Pelayanan umum
- c) Melaksanakan urusan keuangan, seperti:
 - 1. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
 - 2. Verifikasi administrasi keuangan
 - Administrasi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya
- d) Melaksanakan urusan Perencanaan seperti:
 - 1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
 - 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
 - 4. Penyusunan laporan(Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

b. Kaur Keuangan

- 1) Kaur keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - a) Pengurusan administrasi keuangan desa
 - b) Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa
 - c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa
 - d) Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa
 - e) Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa
 - f) Melaksanakan administrasi penghasilan BPD
 - g) Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan
 Desa lainnya

h) Membantu sekretaris desa secara administratif keuangan dalam pembangunan desa(Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

c. Kaur Perencanaan

- Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat
- Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
 - b) Menyusun RAPBDes
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa
 - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)(Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat desa di atas, diketahui bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan berwenang dalam mengelola anggaran dana desa. Mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan programm, hingga evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Mereka memiliki masing-masing tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa, sehingga hal tersebut akan lebih memudahkan dalam penyelenggaraan program.

B. Besaran Dana Desa di Desa Jati

Dana desa sesuai dengan ketentuannya merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan desa yang meliputi dua aspek besar yaitu untuk

penguatan infrstruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat di desa itu sendiri. Sejak tahun 2015, Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi telah memfasilitasi pembangunan desa di setiap provinsi melalui pemberian dana desa.(Widyastuti Cahyaningrum, Adi Sutrisno, 2018) Berikut adalah besaran anggaran DD dan PAD di Desa Jati:

Tabel 3.6 Besaran anggaran DD dan PAD

Tahun	Dana Desa	Penghasilan Asli Desa
2019	986,464,000	161,000,000
2020	1,030,219,000	141,000,000
2021	1,074,271,000	141,000,000

(Sumber Data: Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019-2021)

Berdasarkan tabel 7 di atas besaran anggaran dana desa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah anggaran dana desa untuk Desa Jati yaitu sebesar 986,464,000, di tahun 2020 Desa Jati memperoleh dana desa sebesar 1,030,219,000, dan di tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah anggaran dana desa yaitu sebesar 1,074,271,000. Sedangkan jumlah penghasilan asli desa mengalami sedikit penurunan yaitu dari 161,000,000 menjadi 141,000,000.

Dalam mengelola dana desa pemerintah Desa Jati berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin. Implementasi pedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Transparan

Dalam pengelolaan anggaran dana desa, Desa Jati sudah menerapkan pedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi. Yang mana pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, serta sesuai dengan kaedah-kaedah hukum serta peraturan yang ada. Menurut Bapak Supardi selaku Kepala Desa Jati transparansi di Desa Jati sebagai berikut:

"Desa Jati ini dalam pengelolaan anggaran sudah melakukan transparansi anggaran kepada masyarakat mbak, terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat. Contohnya kita memasang baligo yang memuat informasi pendapatan dan pengeluaran Desa Jati serta berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Sehingga masyarakat dapat mencermati mulai dari pendapatan transfer dan pendapatan asli desa (PAD), bidang penyelenggaraan pemerintah desa (belanja pegawai, operasional kantor, operasional BPD), bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pelaksanaan pembangunan desa, serta bidang pembinaan kemasvarakatan semuanva tercantum dalam baligo tersebut." (Supardi, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

Selaras dengan pendapat di atas, hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ria Tri K selaku masyarakat Desa Jati:

"Menurut saya pemerintah desa sudah melaksanakan kewenangannya dalam mengelola dana desa dengan baik dan transparan mbak. Dengan adanya spanduk yang dipasang di desa, kita sebagai masyarakat menjadi lebih tau anggarannya itu dipergunakan untuk apa saja dan kegiatan seperti apa. Sebelumnya masyarakat Desa Jati masih bertanya-tanya anggaran dana desa itu digunakan untuk apa aja sih? Namun sekarang masyarakat sudah lebih mengerti karena keterbukaan dari pemerintah desa." (Kusuma, n.d. pada tanggal 14 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan penganggaran dana desa sudah menerapkan keterbukaan/transparansi dengan masyarakat. Salah satu langkah Pemerintah Desa dalam memberikan keterbukaan itu adalah dengan cara memasang baligo di Desa Jati terkait dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat dan memahami penggunaan anggaran dana desa tersebut.

2. Akuntabel

Akuntabel disini memiliki arti bahwa semua kegiatan atau program yang ada di Desa Jati harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa. pengelolaan, pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Menurut Bapak Supardi selaku Kepala Desa Jati menerangkan terkait akuntabilitas pengelolan anggaran dana desa di Desa Jati sebagai berikut:

"Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program-program yang dilaksanakan ini dapat kami pertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang mbak, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Jati telah mengikuti standar dan tidak dimanipulasi." (Supardi, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa dapat mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program. Pemerintah Desa dalam membuat laporan pun sudah mengikuti standar dan tidak dimanipulasi. Sehingga seluruh kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa.

3. Partisipatif

Dalam pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah Desa Jati menerapkan asas partisipatif. Yang berarti bahwa dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan program selalu melibatkan masyarakat. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan berkaitan dengan perencanaan program yang akan dilaksanakan, serta dilibatkan dalam setiap pelaksanaan program. Menurut Bapak Suyanto selaku BPD Desa Jati menerangkan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Jati sebagai berikut:

"Dalam pengelolaan anggaran dana desa, Pemerintah Desa Jati sudah melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui forum musyawarah yang diselenggarakan mbak, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya serta bebas untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan dana desa. masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan dan usulan terhadap rencana program untuk kedepannya. Dengan begitu, suatu program menjadi lebih tepat sasarannya, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka sebuah program tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal." (Suyanto, n.d. pada tanggal 13 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan penganggaran desa. Tak cukup sampai disitu, masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan program hingga evaluasi. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga hal tersebut dapat membuat kegiatan berjalan dengan lancar.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah Desa Jati dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa secara tepat waktu, dan pencatatan baik itu untuk pengeluaran ataupun penerimaan semuanya dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang telah diterapkan di desa. Pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasi.(Harnovriansyah, Ana

Sopanah, 2020, p. Hlm.56) Menurut Bapak Suwignyo selaku Sekretaris Desa menerangkan terkait dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Jati sebagai berikut:

"Setiap ada anggaran baik penerimaan atau pengeluaran itu selalu dicatat mbak, karena selain untuk pembukuan kantor hal tersebut juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut saya, Pemerintah Desa Jati sudah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang melandasi. Karena kita sendiri kan tahu ya mbak, kalau anggaran dana desa itu jumlahnya tidak sedikit. Jadi untuk setiap penerimaan dan pengeluaran itu ada catatannya." (Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa Jati telah mengelola penganggaran dana desa secara tepat waktu. Pemerintah Desa juga melakukan pembukuan sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa sesuai dengan prinsip akuntansi. Adanya aturan dan pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijadikan acuan Pemerintah Desa Jati dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa.

Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan dana desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa salah satunya adalah dana desa. Dalam menjalankan kewajiban, hak, tugas, dan wewenangnya dalam mengelola dana desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan yang memuat penggunaan dana desa untuk satu periode anggaran. Kaur keuangan berkewajiban untuk mengurus administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa, termasuk anggaran dana desa. Sedangkan kaur perencanaan berkewajiban untuk

menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).

Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa menjelaskan bahwa dua metode yang dilakukan pemerintah desa dalam sosialisasi penyusunan RPJMDes dan RKPDesa salah satunya adalah musyawarah berjenjang dari tingkat dusun kemudian ke tingkat desa. Selanjutnya, sejauh mana RPJMDes dan RKPDesa dipahami oleh masyarakat dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses sosialisasi. Dalam hal ini, masyarakat sangat berperan penting dalam menyampaikan usulan serta gagasannya dalam mengatasi sebuah masalah di desa.

Sekretaris Desa Jati menambahkan penjelasan, bahwa sosialisasi RPJMDes dan RKPDesa sudah cukup merata karena adanya musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa. Program-program yang diusulkan masyarakat menjadi sebuah upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, namun hal tersebut juga berdampak positif pada peningkatan kemandirian dan perekonomian masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Suwignyo selaku Sekretaris Desa Jati:

"Dengan adanya peran masyarakat, program-program pemberdayaan yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mbak, karena dalam setiap perencanaannya melibatkan masyarakat, dan dalam pelaksanaanya pun juga masyarakat berkontribusi penuh menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga program tersebut dapat mengatasi masalah yang ada di desa. Dulu sebelum masyarakat aktif berperan dalam setiap proses pemberdayaan, dana yang dianggarkan hanya 9%, namun setelah masyarakat mengusulkan beberapa usulan dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang ada, anggaran dana desa yang diberikan untuk pemberdayaan sekarang menjadi 15%."(Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Jati berperan dalam bidang pemberdayaan melalui perencanaan hingga pelaksanaan program. Berbagai usulan masyarakat menjadikan suatu program terencana secara sistematis. Adanya peran masyarakat melalui usulan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan besaran anggaran untuk bidang pemberdayaan di Desa Jati.

C. Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari adanya dana desa yaitu untuk mewujudkan pemerataan ekonomi khususnya di wilayah desa. Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang Dana Desa, tentunya tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan melalui Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menerangkan secara jelas bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas, wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak

terlepas dari adanya peran masyarakat. Berikut adalah bentuk peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati:

1. Memberikan usulan pada kegiatan perencanaan penganggaran dana desa

Seiring berjalannya waktu Desa Jati mengalami perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan. Desa Jati melaksanakan perencanaan pembangunan dengan menggunakan teknik bottom-up dengan mengikutsertakan masyarakat dan menjadikan mereka sebagai mitra kerja sama dalam proses pembangunan. Proses ini membuat masyarakat menyampaikan usulan-usulan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan masalah yang ada agar agar program yang direncanakan tersebut tepat sasaran dan tentunya keberhasilan sebuah program akan tercapai. Menurut Sekretaris Desa Jati yaitu Bapak Suwignyo menyatakan bahwa tahapan atau proses penyampaian aspirasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yaitu melalui program-program kerja desa, yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1.1 Musyawarah Dusun

Pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun (MUSDUS) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat yang sekiranya nanti dapat direalisasikan oleh pemerintah desa.

Gambar 3.4 Musyawarah Dusun RW 02



Sumber Gambar: Dokumentasi oleh peneliti, 2022

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa proses musyawarah dusun (musdus) yang diselenggarakan, ketua RW terlebih dahulu mengundang masyarakat untuk menghadiri forum tersebut. Yang mana musdus tersebut dilaksanakan di rumah Kepala Dusun di wilayah Desa Jati. Dalam forum tersebut sejumlah 15 orang dilibatkan untuk menyampaikan terkait dengan potensi dan masalah yang ada di daerah tersebut. Masyarakat juga mengusulkan beberapa program untuk menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi dengan mempertimbangkan potensi yang ada di desa. Seperti pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan, pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi, dan pemberian bantuan 1 ekor kambing kepada anak difabel. Setelah aspirasi dari masyarakat tertampung pada forum Musyawarah Dusun, maka selanjutnya akan diadakan

Musyawarah Desa (MUSDES). Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Suyanto selaku BPD Desa Jati:

"Dalam musyawarah dusun beberapa masyarakat aktif dalam memberikan usulan program yang akan dilaksanakan kedepannya mbak, mereka mengusulkan sesuatu yang dapat mengatasi permasalahan yang masyarakat hadapi, seperti pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan, pelatihan ekonomi produktif berdasarkan potensi dan pemberian 1 ekor kambing untuk anak-anak difabel. Kebetulan saya juga ikut dalam musyawarah dusun mbak, saya mengusulkan nantinya program-program yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti anak difabel yang diberikan bantuan 1 ekor kambing." (Suyanto, n.d. pada tanggal 13 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa masyarakat aktif dalam menyampaikan aspirasi. Yang mana usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mengatasi masalah yang ada di Desa Jati. Dengan memperhatikan kebutuhan mendesak tersebut, peran masyarakat menjadi menjadi salah satu penunjang keberhasilan suatu program.

1.2 Musyawarah Desa

Pelaksanaan Musyawarah Desa bertujuan untuk mengetahui laporan dari Kepala Dusun mengenai masalah yang sedang dihadapi di setiap wilayah/dusunnya. Sehingga Pemerintah Desa tau apa yang dibutuhkan masyarakat dan dapat menetapkan prioritas programprogram yang akan dijalankan. Pemerintah Desa harus bisa memprioritaskan program untuk wilayah yang memerlukan pembangunan terlebih dahulu.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan hal strategis di desa sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah desa. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan dana desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan dana desa dalam forum musyawarah desa didasarkan pada usulan, aspirasi, dan kemanfaatan kegiatan masyarakat desa. Hal ini diungkap oleh Bapak Suparmin selaku Kepala Dusun di Desa Jati:

"Disana masyarakat mengusulkan beberapa program salah satunya adalah pengadaan sumur gali untuk mengatasi masalah gagal panen mbak, para petani sering gagal panen karena jarak sawah dan sungai yang lumayan jauh sehingga sawah mereka mengalami sering kekeringan. Kekeringan tersebutlah yang menyebabkan para petani menjadi gagal panen. Sehingga dalam musyawarah ini, masyarakat mengusulkan adanya bantuan atau pengadaan sumur gali untuk mengatasi permasalahan kekeringan tersebut." (Suparmin, n.d. pada tanggal 13 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Jati memiliki beberapa masalah. Salah satunya yaitu gagal panen yang disebabkan karena jarak sungai dengan sawah mereka terbilang jauh, sehingga untuk mengairi sawah, masyarakat tidak bisa memenuhi secara maksimal. Hal tersebut yang akhirnya membuat tanaman mereka tidak tumbuh subur dan menyebabkan gagal panen. Untuk itu, masyarakat mengusulkan program pengadaan sumur gali di area persawahan agar masalah tersebut dapat teratasi.

1.3 Musrenbang Desa

Pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bertujuan untuk menyerap aspirasi atau usulan dari masyarakat desa mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan suatu program pemberdayaan masyarakat di Desa Jati.

Gambar 3.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Jati



Sumber Gambar: Dokumentasi oleh peneliti, 2022

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat untuk berkontribusi langsung, salah satunya yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah. Desa Jati dalam menjalankan perencanaan penganggaran dana desa menggunakan teknik bottom-up yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam proses perencanaan ini pemerintah desa melibatkan masyarakat berjumlah 46 orang. Cara ini dilakukan guna mencari data terkait dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat dengan menghadirkan masyarakat, ketua RT/RW, BPD, dan tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut dilaakukan Pemerintah Desa guna membuka ruang secara penuh untuk masyarakat Desa Jati agar dapat menyampaikan aspirasinya. Dalam forum ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada penyelenggara dan peserta lainnya. Pada kesempatan ini masyarakat berusaha meyakinkan bahwa program yang mereka usulkan merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Hal tersebut di dukung oleh penjelasan dari Bapak Lukito sebagai berikut:

"Kami dalam memberikan usulan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi sehingga desa kedepannya menjadi lebih maju mbak. Pada saat musyawarah berlangsung saya mengusulkan agar program-program yang dirancang harus lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, seperti program pengadaan sumur gali itu saya juga ikut mengusulkan karena masalah-masalah yang dihadapi para petani itu berkaitan dengan kekurangan air. Karena air adalah kebutuhan pokok untuk pengairan sawah. Tanpa air yang cukup maka tanaman kami juga tidak bisa tumbuh dengan subur seperti yang kami harapkan."(Lukito, n.d. pada tanggal 12 Juli 2022)

Setelah melakukan musyawarah, maka Pemerintah Desa akan mengambil skala prioritas, dari program-program yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas program akan masuk dalam RPJMDes dan RKPDes. Masyarakat desa melalui BPD berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan dana desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKP Desa. Jika kepala desa bersikeras untuk mengubah rencana penggunaan dana desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan dana desa. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan ide serta aktif berperan dalam proses pemberdayaan sampai dengan selesai. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pola

swakelola. Dimana pemberdayaan dilakukan salah satunya dengan menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai suatu bentuk yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Arah dana desa adalah sebagai sarana jembatan agar sebuah desa menjadi mandiri. Program dana desa merupakan program pemerintah dalam upaya untuk pemerataan pendapatan masyarakat yang dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Melalui usulan masyarakat, program pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa.

2. Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

Partisipasi ini termasuk dalam tahapan proses pemberdayaan yang dilakukan di Desa Jati. Pemerintah Desa mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Desa Jati. Partisipasi ini bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian program. Partisipasi masyarakat dapat membantu Pemerintah Desa untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program menjadi suatu pendukung dalam mengatasi permasalahan di Desa Jati.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dimulai dari penerimaan informasi, memberikan tanggapan terhadap

informasi, perencanaan program pemberdayaan, pelaksanaan program pemberdayaan, penilaian dan akhirnya pengevaluasian program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat di Desa Jati terlihat dari beberapa masyarakat yang ikut serta dalam proses perencanaan, mereka memberikan usulan terhadap perencanaan program yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dapat kita lihat adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan program tersebut. Seperti contoh dalam pelaksanaan program pengadaan sumur gali, masyarakat ikut serta untuk membantu pengerjaan sumur gali tersebut da nada pula masyarakat yang menjadi tenaga kerja dalam program-program pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut.

Terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam pengevaluasian program. Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses pemberdayaan. Masyarakat dilibatkan disini untuk mengawal operasional setiap program yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini yaitu untuk menilai keberhasilan suatu program, dan melihat seberapa besar tingkat perkembangan program yang telah dilaksanakan di Desa Jati dalam 1 tahun terakhir. Juga untuk mengevaluasi administrasi keuangan dll. Kemudian masyarakat menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Desa.

3. Membangun kesadaran bersama akan pentingnya suatu program

Dalam hal ini, beberapa masyarakat yang menjadi perwakilan dalam penyampaian aspirasi mengajak masyarakat lainnya untuk menyadarkan mereka terkait dengan pentingnya program pemberdayaan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Apa tujuan dari suatu program tersebut, untuk apa dan apa manfaatnya untuk masyarakat Desa Jati. Sebagai masyarakat, jangan sampai acuh dengan program-program pemberdayaan, karena hal tersebut yang menyebabkan suatu program tidak berjalan dengan

maksimal, sehingga keberhasilan program pun sulit untuk dicapai. Untuk itu, yang menjadi perwakilan masyarakat harus bisa menyadarkan masyarakat yang lainnya terkait pentingnya program pemberdayaan.

Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga ikut serta dalam mengupayakan kebermanfaatan tersebut. Hubungan rasa saling memiliki terhadap satu sama lain sangat dibutuhkan agar sebuah program berjalan dengan lancar. Masyarakat harus tau dan paham apa yang menjadi tujuan dari sebuah program dan ditujukan untuk apa program tersebut. Tentunya program-program tersebut juga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, membangun kesadaran bersama akan pentingnya program di Desa Jati merupakan salah satu bentuk peran masyarakat yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan program.

D. Hasil Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Peran masyarakat menurut menurut Larry W. Carter adalah "proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab".(Rahayu, 2003, p. Hlm.4) Suatu program dikatakan berhasil apabila kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan dan mampu memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni mengetahui hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah perbedaan sebelum dan sesudah adanya peran masyarakat:

Tabel 3.7 Sebelum dan Sesudah Adanya Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati

No	Sebelum Adanya Peran	Setelah Adanya Peran
	Masyarakat	Masyarakat
1.	Bentuk demokrasi tidak langsung	Terbukanya demokratisasi
2.	Belum terungkap program-	Terungkapnya program-
	program penting	program penting yang tidak
		terfikirkan
3.	Masyarakat pasif untuk	Masyarakat lebih aktif untuk
	berpartisipasi dalam program	berpartisipasi dalam program
	yang diselenggarakan	yang diselenggarakan
4.	Hubungan antara masyarakat	Terwujudnya sinergitas antara
	dengan Pemerintah Desa tidak	masyarakat dengan Pemerintah
	begitu baik	Desa
5.	Masyarakat masih manaruh rasa	Menciptakan kepercayaan
	curiga kepada Pemerintah Desa	masyarakat dengan Pemerintah
	terkait dalam pengelolaan	Desa
	anggaran dana desa	

(Sumber Data: Wawancara dengan beberapa sumber (Supardi, Lukito, Suparmin, Heri Iswanto, dll)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, berikut penjelasannya:

1. Terbukanya saluran demokratisasi di tingkat desa

Masyarakat dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa. Hal tersebut menjadikan masyarakat bebas menyampaikan aspirasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat juga mengedepankan kebutuhan mendesak dengan melihat masalah yang harus segera ada penyelesaiannya.

"Keberadaan peran masyarakat dapat mendukung terbukanya demokratisasi di Desa Jati mbak. Masyarakat menjadi mitra kerjasama Pemerintah Desa untuk mencapai keberhasilan suatu program. Melalui penyampaian usulan masyarakat, Pemerintah Desa dapat dengan mudah memprioritaskan program-program perencanaan penganggaran dana desa. Terbukanya demokratisasi ini membawa manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan baik masyarakat maupun Pemerintah Desa itu sendiri mbak.(Supardi, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022) (Wawancara dengan Bapak Supardi Selaku Kepala Desa Jati pada 11 Juli 2022).

2. Terungkapnya program-program pemberdayaan yang tidak terfikirkan

Dengan adanya peran masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran dana desa, hal tersebut membuat terungkapnya program-program yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Karena masyarakat lebih mengetahui kondisi dan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga program-program penting dan harus menjadi prioritas menjadi terungkap. Berbeda dengan sebelumnya, program-program yang diselenggarakan dinilai kurang tepat sasaran. Berikut ini adalah program dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati:

a) Pengadaan Sumur Gali di Area Persawahan

Pengadaan sumur gali ini bertujuan untuk penyediaan air untuk menunjang kelancaran di sektor pertanian. Karena faktor utama keberhasilan panen adalah dengan adanya ketersediaan air yang cukup. Kondisi geografis di Desa Jati ini berada di wilayah dataran rendah, dengan banyak persawahan yang penduduknya juga sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Namun ketika musim kemarau tiba, masyarakat kesusahan dalam mengambil air karena lokasi sungai yang terlalu jauh dari sawah mereka. Dengan demikian, pengadaan sumur gali merupakan suatu hal yang penting.

Program pengadaan sumur gali menjadi upaya yang bertujuan agar permasalahan gagal panen yang dihadapi para petani dapat teratasi. Salah satu faktor disebabkan karena jarak sungai yang jauh dari area persawahan mereka. Program pengadaan sumur gali memberikan dampak positif dan telah menjadi respon terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Adapun tanggapan dari Bapak Kartono, selaku masyarakat Desa Jati:

"Benar sekali mbak, masalah yang utama itu ya memang sawah kekurangan air itu mbak, karena sungainya jauh dari sawah saya, sehingga membuat para petani harus bolak-balik untuk mengambil air dengan cara dipikul. Sedangkan untuk menyewa mesin diesel juga biayanya tidak murah, apabila setiap penyiraman tanaman kami menyewa mesin diesel maka ketika panen tidak bisa balik modal mbak, kalaupun balik sisanya hanya sedikit, itupun hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga untuk biaya sekolah anak kadang-kadang harus pinjam ke saudara. Jadi program pengadaan sumur gali ini membuat masyarakat lega mbak." (Kartono, n.d. pada tanggal 12 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pengadaan sumur gali tersebut menjadi sebuah jawaban masyarakat untuk mengatasi permasalahan sawah mereka yang kekeringan. Hasil sawah merupakan sumber penghasilan yang utama bagi mayoritas masyarakat di Desa Jati. Pengaruh minimnya system pengairan sawah yang dimiliki desa, pengadaan sumur gali menjadi program utama yang sangat diharapkan masyarakat Desa Jati. Dalam hal ini, Desa Jati telah melakukan pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan yang jumlahnya 18 sumur, yang mana masing-masing sumur terdiri dari 6 doker. Dengan adanya sumur gali di sekitar area persawahan mereka, maka hal tersebut dapat memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan untuk mengairi sawah. Dengan begitu gagal panen menjadi kemungkinan kecil yang akan terjadi, dan keberhasilan panen dapat tercapai.

b) Pelatihan Ekonomi Produktif Masyarakat Sesuai Potensi

Pelatihan ini memiliki tujuan yang sangat positif. Berawal dari pelatihan, masyarakat yang awalnya belum menyadari potensi yang dimiliki, nantinya akan memberinya bekal untuk menciptakan usaha sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Salah satu pelatihan yang kemudian menciptakan penghasilan, dalam artian masyarakat mampu mengembangkan potensinya dan kemudian menjual produknya adalah pembuatan keripik tempe. Meskipun belum menjual sampai luar kota, namun apabila dikembangkan terus maka hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan adanya peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat di Desa Jati berkembang pesat. Adapun pendapat dari masyarakat desa yakni Ibu Lismiyati, selaku warga Desa Jati:

"Adanya pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi ini sangat membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan kreatif mbak. Awalnya masyarakat tidak pernah kepikiran untuk membuat usaha aneka olahan sesuai dengan potensi desa. Setelah adanya pelatihan itu masyarakat menjadi tergerak hatinya untuk memanfaatkan

potensi tersebut menjadi sebuah olahan yang bernilai jual. Akhirnya masyarakat mulai berinovasi dengan membuat aneka olahan seperti keripik tempe, keripik ketela, keripik pisang, donat waluh hingga nastar. Dan masyarakat pun merasakan manfaatnya mbak, salah satunya karena penghasilan mereka bertambah"(Lismiyati, n.d. pada tanggal 12 Juli 2022)

Selaras dengan pendapat di atas, hal senada juga diungkap oleh Bu Sri selaku masyarakat Desa Jati:

"Sebelum mengikuti program pelatihan, saya hanya mengandalkan hasil dari jualan sayur mbak dan saya tidak pernah terfikir untuk mengolah kedelai, kacang dan yang lainnya menjadi makanan yang bisa dijual. Setelah mengikuti pelatihan ekonomi ini saya menjadi tergugah untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi keripik tempe, rempeyek, keripik pisang, donat waluh dan masih banyak lagi mbak. Alhamdulillah pendapatan saya meningkat karena hasil dari penjualan tersebut.." (Sri, n.d. pada tanggal 13 Juli 2022)

Berdasarkan dari wawancara di atas, diketahui bahwa pelatihan ekonomi produktif sesuai dengan potensi memberikan perubahan kesadaran masyarakat di Desa Jati. Bahan-bahan yang mudah didapatkan karena memang termasuk ke dalam potensi desa awalnya disepelekan oleh masyarakat, kini dimanfaatkan menjadi olahan keripik, donat, dll. Tak disangka penjualan tersebut banyak peminatnya dan laku di pasaran. Sehingga membuat masyarakat merasakan manfaatnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi desa dapat merubah kebiasaan masyarakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif.

c) Pemberian Bantuan 1 Ekor Kambing Untuk Anak Difabel

Pemberian bantuan kambing ini bertujuan agar anak-anak yang memiliki keistimewaan tersebut bukan hanya menjadi anak yang tidak bisa produktif melakukan berbagai hal namun mereka bisa memiliki kesibukan dengan menggembala kambing. Desa Jati dalam menjalankan program pemberian 1 ekor kambing untuk masing-masing anak difabel jumlahnya mencapai 16. 1 ekor untuk 1 anak difabel, sehingga total keseluruhan penyelenggaraan program pemberian bantuan kambing tersebut totalnya 16 ekor kambing. Dengan begitu anak-anak yang memiliki keistimewaan tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri. Harapannya kambing yang dirawat tersebut dapat berkembang banyak sehingga menjadi sumber pendapatan bagi dirinya bahkan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan dari Bapak Suparmin Selaku Kepala Dusun Desa Jati:

"Pemberian bantuan 1 ekor kambing untuk anak difabel ini menjadi salah satu upaya untuk menjadikan anak-anak yang memiliki keistimewaan ini mandiri mbak, dan kedepannya mereka bisa lebih rajin dalam merawat kambing tersebut hingga menjadi beberapa ekor, sehingga mereka tidak hanya menggantungkan hidup dengan orang tua, tapi juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil ternak kambing." (Suparmin, n.d. pada tanggal 13 Juli 2022)

Selaras dengan pendapat di atas, hal senada juga diungkap oleh Ibu Suti selaku masyarakat Desa Jati:

"Alhamdulillah mbak, dengan pemberian bantuan kambing ini anak saya menjadi memiliki kegiatan yang bagus, karena setelah putus sekolah anak saya biasanya hanya di rumah saja jarang keluar, meskipun bantuannya hanya 1 ekor kambing tapi Alhamdulillah mbak sekarang kambingnya sudah punya anak 4 ekor." (Suti, n.d. pada tanggal 14 Juli 2022)

Berdasarkan dari wawancara di atas, diketahui bahwa bantuan 1 ekor kambing untuk anak difabel ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kebanyakan dari anak-anak tersebut putus sekolah, sisi positifnya anak-anak penyandang disabilitas tersebut memiliki kegiatan menggembala kambing dan merawatnya hingga berkembang banyak. Sehingga dapat digunakan sebagai tabungan.

"Masyarakat adalah sekelompok orang yang lebih memahami kondisi wilayah dan masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penganggaran dana desa, masyarakat dapat menyampaikan usulan untuk merencanakan program sesuai dengan kebutuhan dan menjadi penyelesaian masalah yang ada mbak. Sehingga hal tersebut membuat terungkapnya program-program penting yang sebelumnya tidak terfikirkan." (Supardi, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)



Gambar 3.6 Pemberian Bantuan 1 Ekor Kambing

Sumber Gambar: Dokumentasi oleh peneliti, 2022

3. Masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi

Masyarakat Desa Jati awalnya belum begitu paham dengan pengelolaan anggaran dana desa, dan untuk apa saja anggaran tersebut di bidang pemberdayaan. Sehingga masyarakat belum aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Setelah Pemerintah Desa melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam penganggaran dana desa, masyarakat menjadi lebih aktif berkontribusi penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

"Dulu sebelum adanya peran masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa, masyarakat masih kurang aktif untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program mbak. namun, sekarang masyarakat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program pemberdayaan yang diselenggarakan, bukan hanya aktif dalam memberikan usulan melainkan semua program yang dilaksanakan.. Mulai dari membantu menyumbangkan ide, pikiran dan juga tenaga.(Suwignyo, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

4. Terwujudnya sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa

Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penganggaran dana desa, menciptakan sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Sinergitas masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program melalui penganggaran dana desa berjalan dengan baik. Pengadaan sumur gali merupakan bentuk fisik dari sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Jati.

"Keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program menciptakan hubungan sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Jati. Sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan program tidak hanya perlu peran masyarakat atau Pemerintah Desa itu sendiri, melainkan peran kita bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa mbak. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan antara lain: pengadaan sumur gali di area persawahan, pelatihan ekonomi produktif sesuai potensi, dan pemberian bantuan 1 ekor kambing untuk anak-anak difabel." (Supardi, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

5. Menciptakan kepercayaan masyarakat

Sebelum adanya keterlibatan masyarakat Desa Jati dan transparansi dari Pemerintah Desa terkait dengan pendayagunaan dana desa dianggarkan untuk bidang apa dan kegiatan yang seperti apa, masyarakat masih suka berfikiran negative terhadap Pemerintah Desa. Namun setelah adanya keterlibatan masyarakat didukung dengan keterbukaan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat, masyarakat menjadi lebih percaya dengan Pemerintah Desa.

"Namanya manusia kan sifatnya berbeda-beda ya mbak, kita memaklumi kalau dulu masyarakat ada yang curiga dengan Pemerintah Desa mengenai penganggaran dana desa. Nah mulai dari situ kita benar-benar melibatkan masyarakat dan berusaha untuk terbuka dengan masyarakat, mulai dari penerimaan sampai pengeluaran anggaran kita komunikasikan dengan masyarakat. Terlebih lagi, kita juga memasang baligo yang bertuliskan penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut. Alhamdulillah masyarakat saat ini sudah tidak terdengar ngrasani (membocarakan Pemerintah Desa) di belakang." (Supardi, n.d. pada tanggal 11 Juli 2022)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Peran masyarakat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang mana bisa kita ketahui dari penjelasan di atas, dengan adanya peran masyarakat menjadikan terbukanya demokratisasi di tingkat desa, terungkapnya program-program pemberdayaan yang penting dan tidak terfikirkan, masyarakat lebih aktif untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan, terwujudnya hubungan sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa serta meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah Desa Jati.

BAB IV

ANALISIS DATA

Bab analisis ini menerangkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan menghubungkannya dengan teori-teori yang terkait secara mendalam. Bagian yang pertama yaitu akan menganalisis mengenai peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua yaitu menganalisis mengenai hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas Ansgri menerangkan bahwa pada dasarnya orang mau berperan serta dalam kegiatan atau aktifitas apabila ia menyadari akan memperoleh manfaat atau kepuasan baik ekonomi maupun dan ia mengetahui dengan benar makna yang dijalankan tersebut yang meliputi programnya, tujuan, langkah, proses, serta tahapan yang lainnya. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan di zaman modern seperti sekarang ini semakin sulit. Apalagi nilai-nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokal dalam masyarakat makin terkikis. Era globalisasi telah merubah sebagian besar perilaku dan gaya hidup masyarakat. (Awaludin Pimay, Agus Riyadi, 2022) Maka dari itu, diperlukan adanya saluran komunikasi antar masyarakat tersebut.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan suatu gagasan, usulan dll kepada pemerintah desa dan ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan.

A. Analisis Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian baik melalui data wawancara yang diperoleh dari observasi di lapangan secara langsung ataupun dari hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan. Pada bab ini peneliti akan menganalisis terkait tujuan penelitian yaitu peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat adalah tokoh penting dalam proses pemberdayaan.

Keberadaan peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat ini mampu melahirkan program-program yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat desa. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka suatu program untuk menangani suatu masalah tidak akan berjalan dengan maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan teori dari Larry W. Carter yang mengemukakan bahwa peran masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab. Sedangkan Arimbi HP mengartikan bahwa peran masyarakat sebagai partisipasi masyarakat sebagai bentuk kekuatan dan kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai kekuatan untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pejabat Negara.

Sesuai dengan teori peran masyarakat menurut Larry W. Carter, perencanaan penganggaran dana desa menggunakan teori ini untuk memberdayakan masyarakatnya melalui pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan, pelatihan ekonomi produktif sesuai potensi, dan pemberian bantuan 1 ekor kambing untuk anak-anak difabel di Desa Jati dari data wawancara dan dokumentasi yang sudah peneliti dapatkan, berikut peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati:

 Memberikan usulan pada kegiatan perencanaan penganggaran dana desa dalam kegiatan musyawarah dusun, musyawarah desa dan musrenbang desa.

Dengan adanya peran masyarakat di Desa Jati telah memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Desa Jati. Adanya peran masyarakat menjadikan suatu program yang direncanakan tepat sasaran. Karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang paham akan kondisi desa. Masyarakat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dalam memberikan usulan, masyarakat benarbenar memperhatikan kebutuhan dan dapat dijadikan penyelesaian masalah.

2. Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan penganggaran dana desa, menjadikan masyarakat ikut serta dalam setiap prosesnya, baik ketika perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. peran masyarakat di Desa Jati bukan hanya sekedar untuk mencapai mencapai tujuan, namun juga terlibat aktif baik fisik maupun psikis. Masyarakat berkontribusi penuh memberikan sumbangan ide maupun tenaga dalam proses pelaksanaan program.

3. Membangun kesadaran bersama akan pentingnya suatu program.

Masyarakat Desa Jati bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga ikut serta dalam mengupayakan kebermanfaatan tersebut. Hubungan rasa saling memiliki terhadap satu sama lain sangat dibutuhkan agar sebuah program berjalan dengan lancar. Masyarakat harus tau dan paham apa yang menjadi tujuan dari sebuah program dan ditujukan untuk apa program tersebut. Tentunya program-program tersebut juga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, membangun

kesadaran bersama akan pentingnya suatu program di Desa Jati adalah salah satu bentuk peran masyarakat yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan program.

Analisis peneliti yang dijadikan kajian untuk penelitian ini yaitu peran masyarakat melalui pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati. Peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati adalah jawaban dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Jati dan memberikan manfaat dalam program pemberdayaan masyarakat. Penyampaian aspirasi/usulan masyarakat Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora ternyata mampu memberikan perubahan yang dapat dilihat dari segi sosial maupun ekonomi. Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Jati seperti pengadaan sumur gali di area persawahan, pelatihan ekonomi produktif sesuai potensi, dan pemberian bantuan 1 ekor kambing memberikan perubahan kemandirian dan kreativitas masyarakat Desa Jati.

Tujuan utama peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati adalah ikut terlibat dalam setiap kegiatan atau program penganggaran dana desa untuk memberikan usulan yang dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Berdasarkan pengamatan peneliti, peran masyarakat di Desa Jati ini sudah baik dan selaras, yang mana masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk merealisasikan program-program yang mendesak.

Keberhasilan dari program-program pendayagunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat sudah dipaparkan di BAB III. Adanya program pemberdayaan masyarakat ini membuat masyarakat menjadi seseorang yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Hal ini membuat masyarakat Desa Jati mengalami peningkatan kesejahteraan.

B. Analisis Hasil Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Berdasarkan dari hasil penelitian baik dari data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan secara langsung ataupun dari hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan. Pada bab ini peneliti akan menganalisis terkait dengan tujuan dari penelitian yaitu mengetahui hasil peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Berbicara tentang hasil, berarti berbicara tentang apakah peran masyarakat yang telah terealisasikan selama ini dapat memberikan perubahan dan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program yang diusulkan yaitu pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan, pelatihan ekonomi produktif sesuai potensi, dan pemberian bantuan 1 ekor kambing.

Dari wawancara yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati sudah memiliki hasil dengan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan masyarakat Desa Jati dapat diketahui mulai mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat karena program yang direncanakan tepat sasaran. Adapun beberapa hal untuk melihat keberhasilan suatu masyarakat di Desa Jati sebagai berikut:

1. Terbukanya saluran demokratisasi di tingkat desa

Masyarakat dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa. Hal tersebut menjadikan masyarakat bebas menyampaikan aspirasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Masyarakat juga mengedepankan kebutuhan mendesak dengan melihat masalah yang harus segera ada penyelesaiannya.

Menurut peneliti dengan hasil ini merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati. Hasil pelibatan masyarakat dalam setiap proses penganggaran dana desa, akhirnya masyarakat lebih bebas dalam menyampaikan aspirasi. Sehingga terbukalah sistem demokratisasi di Desa Jati. Hal tersebut sesuai dengan teori Harris Soche bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Dalam hal ini, masyarakat Desa Jati bebas memberikan usulan terkait dengan perencanaan penganggaran dana desa, yang mana masyarakat diberikan ruang secara penuh oleh pemerintah desa untuk menyampaikan usulan dan masukan dalam rangka perencanaan program pemberdayaan.

2. Terungkapnya program-program pemberdayaan yang tidak terfikirkan

Dengan adanya peran masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran dana desa membuat terungkapnya program-program penting yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat lebih mengetahui kondisi dan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga program-program penting dan harus dijadikan prioritas menjadi terencana dengan sistematis dan pelaksanaan program pun sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Jati. Berbeda dengan sebelumnya, program-program yang diselenggarakan dinilai kurang tepat sasaran.

Menurut peneliti dengan adanya peran masyarakat di Desa Jati ini membuat program-program penting yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh Pemerintah Desa menjadi terungkap. Terungkapnya program penting tersebut tentu membuat program yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran. Program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Jati. Hal ini juga membuktikan bahwa peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati berhasil.

3. Masyarakat lebih aktif

Masyarakat Desa Jati awalnya belum begitu paham dengan pengelolaan anggaran dana desa, dan untuk apa saja anggaran tersebut di bidang pemberdayaan. Hal tersebut membuat masyarakat belum begitu aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Setelah Pemerintah Desa melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam penganggaran dana desa, masyarakat menjadi lebih aktif berkontribusi penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Menurut peneliti dengan adanya pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dana desa, membuat masyarakat menyadari arti pentingnya suatu program. Masyarakat merasa dilibatkan secara penuh oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian, masyarakat pun lebih aktif ikut serta dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Suatu program berjalan dengan lancar dengan adanya peran masyarakat.

4. Terwujudnya hubungan sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Jati

Terciptanya hubungan sinergitas antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa Jati merupakan berkat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penganggaran dana desa di Desa Jati. Hubungan sinergitas masyarakat Desa Jati dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program melalui penganggaran dana desa berjalan dengan baik. Salah satu bentuk fisik dari hubungan sinergitas antara masyarakat

desa dengan Pemerintah Desa Jati adalah Pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan.

Menurut analisis peneliti dengan terciptanya hubungan sinergitas antara Pemerintah Desa Jati dengan Masyarakat Desa Jati merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari adanya peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jati. Keterlibatan masyarakat di setiap proses penganggaran dana desa menjadikan hubungan baik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

5. Menciptakan Kepercayaan Masyarakat

Sebelum adanya keterlibatan masyarakat Desa Jati dan transparansi dari Pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan dana desa dianggarkan untuk bidang apa dan kegiatan yang seperti apa, masyarakat masih suka berfikiran negatif terhadap Pemerintah Desa. Namun setelah adanya keterlibatan masyarakat didukung dengan keterbukaan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat, masyarakat menjadi lebih percaya dengan Pemerintah Desa. Berbicara mengenai kepercayaan masyarakat, Yamagisi menjelaskan bahwa kepercayaan adalah keyakinan orang kepada maksud baik orang lain yang tidak merugikan mereka, peduli pada hak mereka, dan melakukan kewajibannya.

Menurut peneliti dengan adanya transparansi dari Pemerintah Desa terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses penganggaran dana desa membuat masyarakat lebih percaya dengan Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan teori kepercayaan bahwa masyarakat merasa yakin dengan Pemerintah Desa mengenai penganggaran dana desa. Masyarakat merasa tidak ada yang ditutupi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa. Hal tersebut terbukti dengan adanya pemasangan baligo di Desa Jati.

Keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa merupakan salah satu bentuk keberhasilan dalam berdakwah yang ada keterkaitannya dengan QS. Ar-Ra'd Ayat 11. Bahwasannya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, kaitannya dengan peran masyarakat di Desa Jati yaitu, dengan adanya peran masyarakat maka perubahan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik adalah hal yang dapat dicapai. Dimana masyarakat Desa Jati menjadi lebih mandiri dan dapat mengembangkan potensi mereka. Sehingga kesejahteraan pun dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Jati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan melalui pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa cara yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora, maka peneliti dapat memperoleh hasil penelitian dan membuat kesimpulan sebagai berikut:

- Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa 1. Peran Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora meliputi beberapa hal yakni: a) Memberikan usulan pada kegiatan perencanaan penganggaran dana desa, b) Berpartisipasi dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran dana desa, program pemberdayaan, dan evaluasi program pemberdayaan yang telah diselenggarakan melalui pendayagunaan dana desa, c) Membangun kesadaran bersama akan pentingnya suatu program pemberdayaan masyarakat.
- 2. Hasil Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora sebagai berikut: a) Terbukanya demokratisasi, b) Terungkapnya programprogram penting yang tidak terfikirkan, c) Masyarakat menjadi lebih aktif, d) terwujudnya sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, e) Menciptakan kepercayaan masyarakat, f) Memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan Peran Masyarakat Dalam Pendayagunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Berikut ini, peneliti memberikan suatu saran yang berdasarkan pada kondisi penelitian yang telah dilakukan.

- a. Bagi Pemerintah Desa agar selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penganggaran dana desa di Desa Jati untuk menjadikan program yang dijalankan tepat sasaran.
- b. Bagi Masyarakat Desa Jati agar selalu ikut serta dalam setiap proses perencanaan penganggaran dana desa, pelaksanaan program pemberdayaan, dan evaluasi program pemberdayaan yang telah dijalankan melalui penganggaran dana desa guna tercapainya suatu program dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga akan diperoleh kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Maria Yeti. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah". Legal Pluralism. Vol. 7, No. 2.
- Anwas, Oos M. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". (Bandung: Alfabeta).
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, dkk. 2020. "Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf". (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Cahyaningrum, Daud Nawir Widyastuti dan Adi Sutrisno. 2018. "Manfaat Dana Desa di Provinsi Kalimantan Utara". (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Universitas Borneo tarakan).
- Carter, Larry W. 1991. Environmental Impact Assesment, New York. dikutip dari Mella Ismelina Farma Rahayu. 2003 Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. ethos volume 1.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya. 2005. Q.S: Ali-Imran ayat 159. (Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- D, Sarintan Efratani. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan". (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Endah, Kiki. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa". Jurnal Moderat. Vol.6, No.1.
- Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim No.4691
- Hamid, Nur. 2013. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya". Jurnal Pendidik Swara Bhumi. Vol.2, No.1
- Hamid, Nur, Dewi Liesnoor Setyowati, dkk. 2021. "Peran Pendidikan Formal, Keluarga, dan Masyarakat dalam Pendidikan Bencana". Journal Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS). Vol.4, No.1.

- Hanafi, Rindyah. 2018. "Ekonomi Lingkungan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan". (Malang: Media Nusa Creative).
- Haryu. 2017. "Fungsi Dakwah dalam Memperdayakan Umat". Al-Tatwir. Vol.4. No.1.
- Harnovriansyah, Rida dan Ana Sopanah. 2020. "Isu Kontemporer Akuntansi Publik". (Surabaya: Scopindo).
- HP. Arimbi. 1994. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan". Jurnal Hukum Lingkungan. Tahun I-No.1, ICEL, Jakarimbangan dalam peta.
- Imam, Gunawan. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik". (Jakarta: Bumi Aksara).
- M, Dwi Iriani. 2018. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa". Journal Unita.
- Mashur, Pendra Dadang. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar". JOM FISIP, Vol.5, No.1.
- Mella Ismelina Farma Rahayu. 2003. "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1, No.1.
- Pimay, Awaludin, Agus Riyadi, dan Nur Hamid. 2022. "Pendampingan Masyarakat Sub Urban Melalui Penguatan Kepasitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang". Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.7, No.1.
- R, Yamulia Hulu, Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution. 2018. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Sany, Ulfi Putra. 2019. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an". Jurnal Ilmu Dakwah.Vol.39, No.1.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1985. "Method of Survey Research"

- Sugiono. 2006. "Metode Penelitian Kualitatif". (Jakarta: Dina Aksara).
- Supranto. 1998. "Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran". (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI).
- Sumadiningrat, Gunawan. 1999. "Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Social. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. "Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat". (Jakarta: Citra Utama).
- Soekanto, Soerjono. 1987. "Sosial Suatu Pengantar". (Jakarta: Rajawali Press).
- Syarfi'i, Agus Ahmad. 2007. "Manajemen Masyarakat Islam". (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru).
- Usman, Sunyoto. 2015. "*Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Wawancara dengan Bapak Heri iswanto (Kaur Perencanaan) di Kantor Desa Jati, pada tangal 20 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Bapak Kartono (Masyarakat Desa Jati) pada tanggal 12 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Lukito (Masyarakat Desa Jati) pada tanggal 12 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Supardi (Kepala Desa Jati) pada tanggal 11 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Suparmin (Kepala Dusun) di Kantor Desa Jati, pada tangal 20 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Bapak Suwignyo (Sekretaris Desa Jati) di Kantor Desa, pada tanggal 11 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Suyanto (BPD Desa Jati) pada tanggal 13 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Lismiyati (Masyarakat Desa Jati) pada tanggal 26 Mei 2022.
- Wawancara dengan Ibu Ria Tri K (Masyarakat Desa Jati) pada tanggal 12 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sri (Masyarakat Desa Jati) pada tanggal 13 Juli 2022.
- Wawancara dengan Ibu Suti (Masyarakat Desa jati) pada tanggal 14 Juli 2022.

Yulian, Ivan. 2021. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan". (Surabaya: Jakad Media Publishing).

LAMPIRAN

Lampiran 1



Wawancara dengan Bapak Supardi selaku Kepala Desa Jati



Wawancara dengan Bapak Suwignyo selaku Sekretaris Desa Jati



Wawancara dengan Bapak Suparmin selaku Kepala Dusun Desa Jati



Wawancara dengan Bapak Pajari selaku Kaur Keuangan Desa Jati



Wawancara dengan Bapak Heri Iswanto selaku Kasi Pemerintahan Desa Jati



Wawancara dengan Bu Lismiyati selaku masyarakat Desa Jati



Wawancara dengan Bu Ria Tri K. selaku masyarakat Desa Jati



Pelatihan Ekonomi Produktif Sesuai Potensi



Wawancara dengan Bapak Lukito selaku masyarakat Desa Jati



Pengadaan sumur gali di sekitar area persawahan

Lampiran 2

Perizinan Penelitian



Lampiran 3

Draft Wawancara

Wawancara dengan Pemerintah Desa Jati

- 1. Bagaimana letak geografis dan batas administratif Desa Jati?
- 2. Apa Visi dan Misi dari Desa Jati?
- 3. Bagaimana struktur Pemerintah Desa Jati?
- 4. Berapa jumlah penduduk di Desa Jati?
- 5. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Desa Jati?
- 6. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Desa Jati?
- 7. Apa potensi yang dimiliki Desa Jati ini yang dapat dikelola atau dikembangkan?
- 8. Berapa jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Jati?
- 9. Apakah Pemerintah Desa sudah memahami pentingnya peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa sebagai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat?
- 10. Apakah Pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat secara penuh dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat?
- 11. Bagaimana respon masyarakat dengan diterapkannya program pemberdayaan masyarakat?
- 12. Bagaimana peran masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat?
- 13. Bagaimana sistem pelaksanaan program sebelum dan sesudah adanya peran masyarakat?
- 14. Apakah pelaksanaan program pemberdayaan lebih efektif dengan adanya peran masyarakat?
- 15. Apa dampak yang dihasilkan setelah adanya peran masyarakat dalam pendayagunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat?

Wawancara dengan Masyarakat Desa Jati

- 1. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Jati?
- 2. Apakah masyarakat mengetahui adanya program pemberdayaan masyarakat?
- 3. Apakah masyarakat dilibatkan Pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat?
- 4. Bagaimana respon masyarakat setelah diikutsertakan Pemerintah Desa dalam setiap proses penganggaran dana desa?
- 5. Sudah berapa lama masyarakat Desa Jati dilibatkan secara penuh dalam setiap proses penganggaran dana desa?
- 6. Apakah Pemerintah Desa sudah terbuka dengan masyarakat terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa?
- 7. Bagaimana perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya peran masyarakat?
- 8. Bagaimana respon masyarakat Desa Jati terkait dengan adanya program pemberdayaan masyarakat?
- 9. Apakah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat?
- 10. Apakah masyarakat dalam menyampaikan usulan sudah ternaungi dengan adanya program pemberdayaan masyarakat?
- 11. Apa saja program pemberdayaan masyarakat di Desa Jati yang sudah terlaksana?
- 12. Bagaimana keadaan masyarakat sebelum adanya program pemberdayaan masyarakat di Desa Jati?
- 13. Bagaimana keadaan masyarakat sesudah adanya program pemberdayaan masyarakat di Desa Jati?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Nuzumul Laelli

NIM : 1801046066

Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 1 November 2000

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat : Dusun Bebegan, RT 002, RW 002, Desa Jati,

Kecamatan Jati, Kabupaten Blora

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

E-mail : nuzumullaelli3@gmail.com

Nomor Hp : 081237478108

Pendidikan Formal

TK Pertiwi 1 Jati : Lulus Tahun 2006
 SD Negeri 1 Jati : Lulus Tahun 2012
 SMP Negeri 1 Doplang: Lulus Tahun 2015

4. SMA Negeri 1 Gabus: Lulus Tahun 2018

Pendidikan Non Formal

1. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal

2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut

3. Uji Sertifikasi di LPTP Karanganyar

4. Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Ngaliyan Semarang